

***Ecotheology Implementation Strategy through  
Strengthening Campus Environmental Governance  
at UIN Syekh Wasil Kediri***

**Strategi Implementasi Ekoteologi melalui Penguatan Tata  
Kelola Lingkungan Kampus di UIN Syekh Wasil Kediri**

Author's Name\* : Achmad Syafiqul Kholan  
Institution/University : Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
Correspondence Author's E-mail : [askholan@uinkediri.ac.id](mailto:askholan@uinkediri.ac.id)

| Article History | Received<br>(June 6 <sup>th</sup> , 2026) | Revised<br>(July 1 <sup>st</sup> , 2026) | Accepted<br>(August 7 <sup>th</sup> , 2026) |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

**News Article**

**Keyword:**

*Ecotheology;  
Waste  
Management;  
Internal Policy;  
Green Campus;  
Rector's  
Regulation.*

**Abstract**

*This policy study is motivated by the low score of Asta Protas Implementation Evaluation on protas 2 (Ecotheology) at UIN Syekh Wasil Kediri (Very Poor), which indicates a wide gap between the national ecotheology policy of the Ministry of Religious Affairs and local environmental governance practices. This study aims to analyze the structural determinants of low participation in integrated waste management due to limited sustainable independent processing infrastructure as a direct impact of the university's internal policies that emphasize the provision of formal academic facilities rather than environmental management facilities, while simultaneously formulating applicable strategic intervention options. The method used is a qualitative descriptive-evaluative approach using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) matrix. The results of the USG analysis determined that low participation of the academic community in integrated waste management is a top priority problem (score 15) rooted in limited sustainable independent processing infrastructure. In conclusion, the stagnation of the environmental movement on this religious campus is not caused by individual laziness, but rather by systemic failure due to the absence of structural incentives and weak managerial commitment. Therefore, it is recommended to the Rector of the Syekh Wasil State Islamic University of Kediri to issue a "Rector's Regulation on Guidelines for Ecotheology-Based Green Campus Governance." This form of regulation was chosen as the main priority because it has absolute advantages with the highest score on the criteria of effectiveness and adequacy (score 5), making it the most powerful, binding, and comprehensive legal instrument compared to other alternatives triggering behavioral transformation towards sustainable ecological piety.*

**Kata Kunci:**

*Ekoteologi;  
Pengelolaan  
Limbah;  
Kebijakan  
Internal;*

**Abstrak**

*Kajian kebijakan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya skor Evaluasi Implementasi Asta Protas pada protas 2 (Ekoteologi) di UIN Syekh Wasil Kediri (Sangat Kurang), yang menunjukkan adanya kesenjangan lebar antara kebijakan ekoteologi nasional Kementerian Agama dengan praksis tata kelola lingkungan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk*

Kampus Hijau;  
Peraturan  
Rektor.

menganalisis determinan struktural akibat rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu akibat keterbatasan infrastruktur pengolahan mandiri yang berkelanjutan sebagai dampak langsung dari kebijakan internal universitas yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan sarana akademik formal ketimbang fasilitas kelola lingkungan, sekaligus merumuskan opsi intervensi strategis yang aplikatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif menggunakan matriks Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Hasil analisis USG menetapkan bahwa rendahnya partisipasi civitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu merupakan masalah prioritas utama (skor 15) yang berakar dari keterbatasan infrastruktur pengolahan mandiri yang berkelanjutan. Kesimpulannya, stagnasi gerakan lingkungan di kampus keagamaan ini bukan disebabkan oleh faktor kemalasan individu, melainkan kegagalan sistemik akibat absennya insentif struktural dan lemahnya komitmen manajerial. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri untuk menerbitkan “Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi”. Bentuk regulasi ini dipilih sebagai prioritas utama karena memiliki keunggulan mutlak dengan skor tertinggi pada kriteria efektivitas dan kecukupan (skor 5), menjadikannya instrumen hukum yang paling kuat, mengikat, dan komprehensif dibandingkan alternatif lainnya memicu transformasi perilaku menuju kesalehan ekologis yang berkelanjutan.

**To cite this article:** Achmad Syafiqul Kholan. (2026). “Ecotheology Implementation Strategy through Strengthening Campus Environmental Governance at UIN Syekh Wasil Kediri”. *AMUYA: Indonesia Journal of Management Reviews*, Volume 2 (2), July-December, 2026. Page: 311 – 338.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Krisis lingkungan hidup global pada abad ke-21 telah mencapai titik kritis yang mengancam eksistensi seluruh makhluk hidup di bumi. Fenomena perubahan iklim global, deforestasi masif, polusi udara yang tak terkendali, dan degradasi kualitas tanah bukan lagi sekadar isu ekologis sektoral, melainkan sebuah ancaman eksistensial yang nyata bagi peradaban modern (Chayati et al., 2025). Dampak kerusakan ini menimbulkan efek domino yang memengaruhi kestabilan sosial, ekonomi, hingga kelangsungan ekosistem global secara jangka panjang.

Di tengah keterbatasan dan kegagalan berbagai pendekatan teknokratis serta legal-formal dalam mengatasi persoalan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks, muncul kesadaran global bahwa krisis ekologis sesungguhnya tidak hanya merupakan persoalan teknis, ekonomi, atau politik semata, melainkan juga berakar pada krisis spiritual, moral, dan etika manusia. Berbagai kebijakan lingkungan, regulasi hukum, maupun inovasi teknologi yang dirancang untuk menekan laju degradasi alam sering kali belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan karena tidak menyentuh akar permasalahan yang mendasar, yaitu cara pandang manusia terhadap alam. Paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh sistem kehidupan telah melahirkan pola relasi yang eksploitatif terhadap lingkungan. Dalam paradigma ini, alam dipandang semata-mata sebagai objek dan sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas demi memenuhi kebutuhan, kepentingan ekonomi, serta

syahwat materialistis manusia (Dina et al., 2026). Akibatnya, berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim terus mengalami peningkatan dalam skala global.

Di sinilah peran agama menjadi sangat vital sebagai penyedia fondasi etis dan moral yang kuat guna memandu perilaku manusia terhadap alam sekitarnya. Gagasan untuk mengintegrasikan kesadaran spiritual dengan tanggung jawab ekologis melahirkan sebuah pendekatan keilmuan yang dikenal sebagai ekoteologi (Ghozali, 2025). Ekoteologi Islam berupaya menafsirkan kembali teks-teks suci keagamaan agar mampu merespons tantangan lingkungan secara kontekstual, dinamis, dan aplikatif.

Melalui kacamata ekoteologi, alam semesta dipandang sebagai ejawantah atau manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta yang wajib dijaga kesucian dan kelestariannya. Manusia tidak lagi memosisikan diri sebagai penguasa mutlak yang destruktif, melainkan mengemban amanah suci sebagai khalifah *fi al-ard* yang bertugas merawat bumi (Anwar, 2025). Konsep teologis ini menggeser orientasi kesalehan individu yang egois menuju kesalehan ekologis yang inklusif dan transformatif.

Menyadari urgensi krisis tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menetapkan gerakan penguatan ekoteologi sebagai salah satu program prioritas nasional Kementerian Agama. Kebijakan ini merupakan bentuk respons strategis terhadap berbagai tantangan ekologis yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual masyarakat. Melalui penguatan ekoteologi, Kementerian Agama berupaya membangun kesadaran bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif atau tuntutan pembangunan berkelanjutan, melainkan juga merupakan bagian integral dari nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai penjaga dan pengelola bumi. Dalam perspektif ini, kerusakan lingkungan dipahami sebagai konsekuensi dari melemahnya kesadaran moral dan spiritual manusia dalam menjalankan amanahnya terhadap alam semesta (Rohman & Syaibani, 2026).

Melalui program Ekoteologi yang tercantum dalam Asta Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama, setiap satker didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dengan ajaran dan praktik keagamaan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hubungan manusia dengan alam merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek tata kelola organisasi, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta budaya kerja kelembagaan.

Bagi perguruan tinggi keagamaan negeri, implementasi program Ekoteologi memiliki posisi yang strategis karena kampus tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dituntut untuk menerjemahkan mandat Ekoteologi ke dalam kebijakan institusional, kurikulum pembelajaran, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengelolaan lingkungan kampus yang berkelanjutan. Implementasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem akademik yang mendukung terwujudnya kesadaran ekologis di kalangan sivitas akademika.

Mandat pelaksanaan Ekoteologi pada seluruh satker juga menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral yang terpisah dari tugas dan fungsi kelembagaan. Sebaliknya, pelestarian lingkungan ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, keberhasilan program Ekoteologi tidak hanya diukur dari terselenggaranya

kegiatan yang bertema lingkungan, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai ekologis telah terinternalisasi dalam budaya organisasi dan praktik kelembagaan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi keagamaan negeri seperti UIN Syekh Wasil Kediri memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan program Ekoteologi sebagai bagian dari pelaksanaan mandat Kementerian Agama. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi internal, penguatan literasi ekologi berbasis nilai-nilai keagamaan, pengembangan kampus hijau (green campus), pengelolaan sampah dan energi yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi sivitas akademika dalam berbagai program pelestarian lingkungan. Dengan demikian, implementasi Ekoteologi tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap kebijakan kementerian, tetapi juga menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa institusi pendidikan keagamaan tidak dapat lagi bersikap pasif, apatis, atau hanya menjadi pengamat terhadap berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Sebaliknya, lembaga pendidikan keagamaan dituntut untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam membangun budaya ekologis melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta praktik kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keagamaan, dan pembentukan karakter generasi masa depan, perguruan tinggi keagamaan memiliki posisi strategis dalam menanamkan kesadaran ekologis yang berbasis pada ajaran agama dan etika lingkungan.

Terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa memberikan dorongan kuat bagi seluruh satuan kerja Kementerian Agama untuk berpartisipasi dalam aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa merupakan salah satu bentuk implementasi program ekoteologi yang menjadi bagian dari Asta Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029.

Kondisi tersebut kemudian memengaruhi cara pandang sebagian warga dan satuan kerja dalam memaknai ekoteologi. Karena program yang paling banyak disosialisasikan dan diimplementasikan adalah gerakan penanaman pohon, ekoteologi sering kali dipersepsikan secara sempit sebagai kegiatan penghijauan atau penanaman pohon semata. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja, madrasah, perguruan tinggi keagamaan, kantor Kementerian Agama, maupun lembaga keagamaan lebih banyak berfokus pada aksi penanaman pohon sebagai wujud nyata pelaksanaan program ekoteologi.

Padahal, secara konseptual ekoteologi memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar penanaman pohon. Ekoteologi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kesadaran dan tanggung jawab ekologis dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, implementasinya dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, konservasi energi dan air, digitalisasi administrasi untuk mengurangi konsumsi kertas, pengembangan ruang hijau, serta edukasi dan pembudayaan perilaku ramah lingkungan di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Seperti yang terjadi di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri, implementasi ekoteologi masih belum terarah. Beberapa fakultas yang masih memiliki lahan yang cukup luas memiliki inisiatif melakukan penanaman pohon, berbeda dengan fakultas lain yang memiliki lahan terbatas. Beberapa ruang diskusi hanya membahas tentang wacana konseptual terkait ekologi.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan lingkungan di perguruan tinggi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, komitmen manajerial, dan budaya organisasi yang ada di kampus tersebut. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari level pimpinan tertinggi di universitas, program-program ekoteologi yang dicanangkan oleh pusat akan terjebak dalam pusaran wacana retorik semata (Rohman & Syaibani, 2026). Kampus dituntut untuk mampu menerjemahkan visi besar kementerian ke dalam rencana aksi yang konkret dan terukur.

Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana respons dan dinamika internal yang terjadi di perguruan tinggi keagamaan tingkat lokal dalam menyikapi kebijakan ekoteologi ini. Salah satu institusi yang menjadi sorotan utama dalam konteks implementasi kebijakan ini adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. Evaluasi mendalam diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan nasional ini telah diimplementasikan secara substantif di kampus tersebut.

UIN Syekh Wasil Kediri merupakan salah satu potret PTKIN yang sedang mengalami fase transformasi institusional yang sangat dinamis dari bentuk institut menuju universitas penuh. Perubahan status ini menuntut UIN Syekh Wasil Kediri tidak hanya unggul dalam aspek kuantitas kelembagaan, melainkan juga harus mampu menunjukkan mutu akademik dan relevansi sosial yang tinggi (Anwar, 2025). Salah satu indikator mutu universitas modern saat ini adalah kepedulian mereka terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penyematan nama besar "Syekh Wasil" sebagai identitas institusi pendidikan tinggi mengandung makna simbolik yang penting dalam membangun arah, karakter, dan nilai-nilai yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan. Identitas kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai penanda administratif, tetapi juga merepresentasikan seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam pengembangan budaya akademik, tata kelola organisasi, serta pengambilan kebijakan strategis. Oleh karena itu, penggunaan nama yang memiliki akar historis, religius, dan kultural membawa konsekuensi berupa tanggung jawab moral bagi seluruh sivitas akademika untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan kampus.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penguatan kesadaran ekologis, identitas kelembagaan dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan paradigma pendidikan yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan lingkungan. Kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang mendukung pelestarian lingkungan. Melalui integrasi nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ke dalam sistem pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola kelembagaan, perguruan tinggi dapat berkontribusi secara nyata dalam mendorong terciptanya budaya akademik yang ramah lingkungan. Dengan demikian, identitas institusi tidak hanya memiliki fungsi simbolis, tetapi juga dapat menjadi landasan normatif yang memperkuat komitmen kampus dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Sebagai pusat keunggulan di wilayah eks-Keresidenan Kediri, UIN Syekh Wasil Kediri memikul ekspektasi publik yang besar untuk memimpin gerakan pelestarian lingkungan berbasis Islam. Wilayah Mataraman yang kaya akan potensi agraria namun rentan terhadap dampak industrialisasi membutuhkan kontribusi pemikiran nyata dari kalangan akademisi kampus keagamaan (Chayati et al., 2025). Kampus diharapkan hadir memberikan solusi teologis dan praktis atas berbagai problem lingkungan lokal.

Namun, realitas fisik dan spasial di lingkungan internal kampus UIN Syekh Wasil Kediri saat ini menunjukkan kondisi yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip *green campus*. Tata ruang terbuka hijau yang minim, pengelolaan sampah domestik yang masih

konvensional, serta tingginya emisi kendaraan bermotor di dalam area kampus mencerminkan belum jalannya tata kelola lingkungan yang baik. Kondisi empiris ini memicu keprihatinan mendalam terkait komitmen ekologis institusi tersebut.

Kesenjangan antara nilai-nilai luhur yang diusung sebagai perguruan tinggi Islam dan praktik menjaga kebersihan harian di kalangan sivitas akademika mengindikasikan perlunya penguatan serta optimalisasi dalam sistem edukasi ekologis kampus. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pemborosan penggunaan energi masih menjadi pemandangan umum di area ruang kelas maupun perkantoran. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman keagamaan yang diajarkan belum mampu bertransformasi menjadi kesadaran ekologis yang aplikatif (Ghozali, 2025).

Lemahnya implementasi program ekoteologi di UIN Syekh Wasil Kediri berkaitan dengan belum terintegrasinya agenda ekoteologi ke dalam kerangka perencanaan kelembagaan secara komprehensif. Kondisi tersebut tercermin dari belum tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan kampus berwawasan lingkungan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program. Pada saat yang sama, isu ekoteologi belum memperoleh posisi yang signifikan dalam orientasi pengembangan institusi sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan strategis universitas. Temuan tersebut sejalan dengan hasil Evaluasi Implementasi Asta Program Prioritas (Asta Protas) di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri yang menunjukkan capaian program ekoteologi berada pada kategori sangat kurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai-nilai ekoteologi dalam tata kelola kelembagaan, budaya organisasi, serta aktivitas akademik belum berlangsung secara optimal. Akibatnya, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan cenderung berkembang secara parsial dan belum menunjukkan keterhubungan yang kuat dalam kerangka pengelolaan institusi yang terintegrasi.

Keterbatasan fasilitas pendukung di UIN Syekh Wasil Kediri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi Program Ekoteologi dalam kerangka Asta Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama. Kondisi tersebut tercermin dari belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan lingkungan kampus secara berkelanjutan, seperti fasilitas pengelolaan sampah terpadu, sistem pengolahan limbah, infrastruktur konservasi energi, serta sarana pendukung pengembangan ruang terbuka hijau. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa aspek fisik dan infrastruktur kampus belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan program yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan penguatan budaya ekologis di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, ketersediaan fasilitas yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas berbagai aktivitas yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai ekoteologi. Meskipun terdapat upaya dan inisiatif dari sivitas akademika untuk mendukung agenda pelestarian lingkungan, keterbatasan sarana pendukung menyebabkan pelaksanaan program belum dapat berlangsung secara maksimal dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan kebijakan Ekoteologi yang menekankan transformasi perilaku dan tata kelola lingkungan dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia di tingkat institusi. Oleh karena itu, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu karakteristik yang menunjukkan bahwa lingkungan fisik kampus belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Program Ekoteologi sebagaimana diamanatkan dalam Asta Protas Kementerian Agama.

Dari aspek akademik, implementasi nilai-nilai ekoteologi dalam proses pembelajaran di UIN Syekh Wasil Kediri masih menunjukkan tingkat integrasi yang terbatas. Struktur kurikulum pada sebagian besar program studi masih berfokus pada kajian keagamaan normatif, sementara pengarusutamaan isu-isu lingkungan dalam pembelajaran belum

memperoleh porsi yang memadai (Rohman & Syaibani, 2026). Muatan ekoteologi dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam maupun bidang ilmu syariah umumnya masih disajikan dalam bentuk konsep dan landasan teoretis, sehingga keterkaitannya dengan persoalan lingkungan aktual belum terbangun secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan praktik pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Akibatnya, internalisasi kesadaran ekologis melalui kegiatan akademik cenderung berlangsung pada tataran kognitif dan belum berkembang secara signifikan ke dalam dimensi afektif maupun perilaku yang mendukung pembentukan budaya ekologis di lingkungan perguruan tinggi.

Keterbatasan dukungan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi program ekoteologi di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri. Alokasi sumber daya keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan masih menunjukkan porsi yang relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan program secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa agenda ekoteologi belum sepenuhnya terintegrasi dalam prioritas penganggaran institusi, sehingga dukungan finansial terhadap berbagai kegiatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan belum optimal (Habibi, 2025). Situasi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas institusi dalam mengembangkan program, fasilitas, maupun aktivitas yang mendukung internalisasi nilai-nilai ekoteologi di lingkungan kampus. Akibatnya, berbagai inisiatif yang muncul dari sivitas akademika dalam bidang pelestarian lingkungan menghadapi keterbatasan dalam aspek implementasi dan keberlanjutan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi pendanaan masih menjadi salah satu tantangan dalam upaya pelebagaan ekoteologi sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Tata kelola operasional di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri menunjukkan bahwa prinsip efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan belum terimplementasi secara optimal dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya penggunaan bahan habis pakai dalam kegiatan administrasi perkantoran serta belum terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang terstandarisasi, khususnya dalam aspek pemilahan sampah berdasarkan jenisnya (Nabilla et al., 2025). Situasi ini mengindikasikan bahwa praktik pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam prosedur operasional kampus sebagai bagian dari budaya organisasi. Akibatnya, nilai-nilai ekoteologi yang menekankan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan belum teraktualisasi secara konsisten dalam tata kelola kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap pelestarian lingkungan dan praktik operasional yang berlangsung di tingkat institusi. Dengan demikian, lingkungan kampus belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari implementasi ekoteologi dalam kehidupan akademik dan administratif.

Aspek keteladanan dalam kepemimpinan institusi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program ekoteologi di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri. Dalam konteks perubahan budaya organisasi, perilaku dan praktik yang ditunjukkan oleh pimpinan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi, komitmen, dan partisipasi sivitas akademika terhadap suatu kebijakan. Namun demikian, berbagai upaya yang mendorong penerapan perilaku ramah lingkungan di lingkungan kampus belum selalu diikuti oleh praktik yang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan (Ghozali, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ekologis yang dikomunikasikan melalui kebijakan dan

implementasinya dalam aktivitas institusional. Situasi ini berpotensi memengaruhi tingkat penerimaan dan dukungan sivitas akademika terhadap program ekoteologi, karena keteladanan merupakan salah satu instrumen penting dalam proses internalisasi nilai dan pembentukan budaya organisasi. Dengan demikian, konsistensi antara komitmen normatif dan praktik kelembagaan menjadi aspek yang berpengaruh terhadap penguatan legitimasi dan efektivitas implementasi program ekoteologi di lingkungan perguruan tinggi.

Lemahnya implementasi program ekoteologi berimplikasi pada capaian kinerja kelembagaan yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks persaingan antarperguruan tinggi yang semakin menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, berbagai indikator pengelolaan lingkungan telah menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kualitas tata kelola institusi. Hasil evaluasi pada sejumlah pemeringkatan kampus berkelanjutan menunjukkan bahwa capaian UIN Syekh Wasil Kediri masih relatif terbatas dibandingkan dengan beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah lebih dahulu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam tata kelola kampus secara sistematis (Habibi, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi program ekoteologi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan daya saing institusional dalam bidang pengelolaan lingkungan. Selain mencerminkan masih terbatasnya pelestarian budaya ekologis di lingkungan kampus, situasi ini juga menunjukkan bahwa upaya penguatan identitas perguruan tinggi sebagai institusi yang berorientasi pada keberlanjutan belum berkembang secara optimal. Dengan demikian, capaian implementasi ekoteologi menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap penguatan reputasi dan pengakuan institusional pada tingkat nasional maupun internasional.

Dari perspektif akademik dan intelektual, keterbatasan implementasi ekoteologi berimplikasi pada belum berkembangnya diskursus keagamaan yang secara memadai merespons isu-isu lingkungan kontemporer. Kajian keislaman yang berkembang di lingkungan kampus masih didominasi oleh pembahasan aspek normatif dan konseptual, sementara elaborasi terhadap persoalan ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan belum memperoleh perhatian yang proporsional (Dina et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses kontekstualisasi ajaran agama terhadap tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan krisis keberlanjutan, masih berlangsung secara terbatas. Akibatnya, pengembangan pemikiran keagamaan yang berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah ekologis belum terintegrasi secara kuat dalam tradisi akademik maupun ruang-ruang diskusi keagamaan di lingkungan universitas. Situasi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara dinamika permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dengan pengembangan wacana keagamaan yang diharapkan mampu memberikan perspektif etis, teologis, dan praksis dalam merespons berbagai tantangan ekologis yang dihadapi masyarakat kontemporer.

Berbagai permasalahan dan dampak yang muncul menunjukkan bahwa implementasi program ekoteologi di UIN Syekh Wasil Kediri masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, sumber daya, budaya organisasi, hingga pelaksanaan aktivitas akademik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan ekoteologi yang diamanatkan dalam Asta Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama dengan praktik implementasinya di tingkat institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan, mekanisme kelembagaan, serta sistem tata kelola yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong internalisasi nilai-nilai ekologis secara efektif dan berkelanjutan dalam lingkungan kampus (Rohman & Syaibani, 2026). Oleh karena itu,

permasalahan implementasi ekoteologi di UIN Syekh Wasil Kediri dapat dipahami sebagai persoalan tata kelola kebijakan yang memerlukan perhatian dalam rangka memperkuat integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi. Dengan demikian, penguatan aspek kelembagaan, regulasi, dan tata kelola menjadi isu strategis yang relevan untuk dikaji dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi program ekoteologi di lingkungan universitas.

Berdasarkan latar belakang problematika di atas, maka artikel kebijakan (policy paper) ini disusun untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penghambat struktural serta merumuskan rekomendasi strategi kebijakan yang aplikatif demi memperkuat implementasi program ekoteologi pada UIN Syekh Wasil Kediri. Melalui tawaran solusi yang berbasis data empiris, diharapkan kampus ini mampu bangkit bertransformasi menjadi pelopor gerakan green campus yang memadukan spiritualitas Islam dengan aksi nyata pelestarian alam demi masa depan generasi mendatang.

## **Identifikasi Masalah**

### **1. Rendahnya Partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu**

Rendahnya partisipasi civitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu di UIN Syekh Wasil Kediri merupakan salah satu indikator paling nyata dari belum jalannya program ekoteologi secara substantif di lapangan. Persoalan ini tidak boleh dilihat sebatas masalah kemalasan individu, melainkan sebuah kegagalan sistemik dalam membangun budaya keberlanjutan (culture of sustainability) di lingkungan kampus. Ketidadaan keterlibatan aktif ini mencakup seluruh pelapis elemen kampus, mulai dari level pengambil kebijakan, tenaga kependidikan, dosen, hingga mahasiswa (Handayani, 2025).

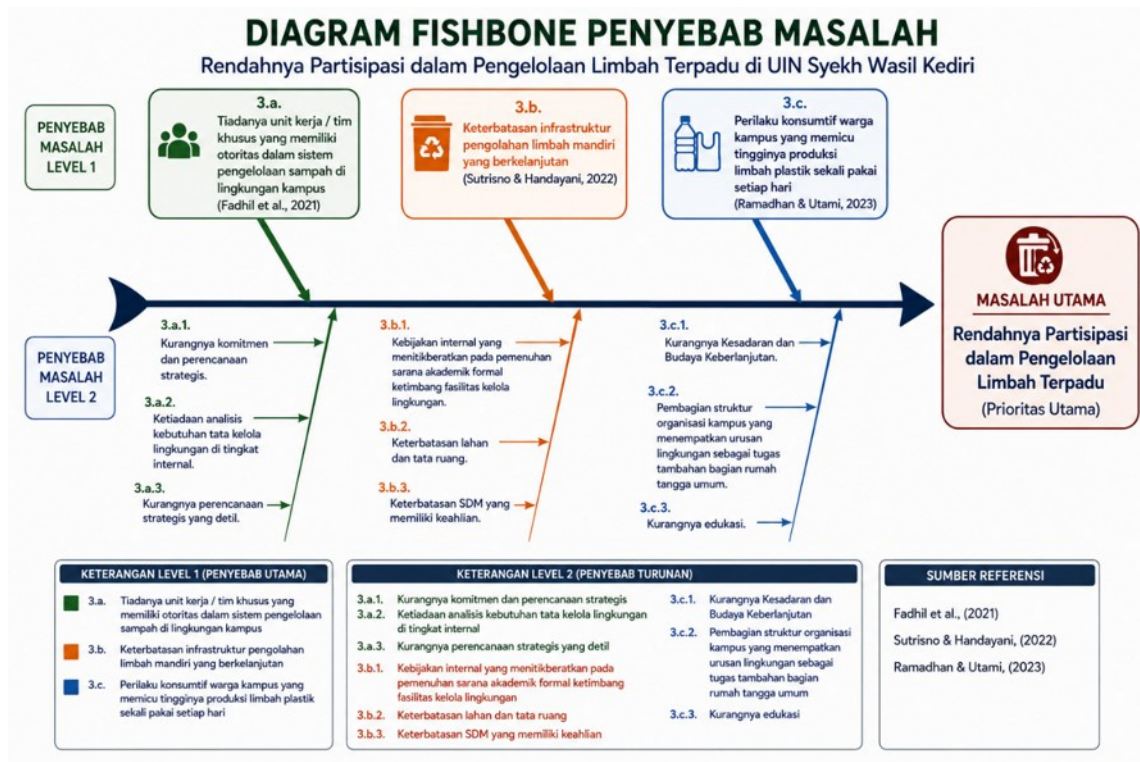
### **2. Keterbatasan fasilitas**

Keterbatasan ini terlihat jelas pada infrastruktur tata kelola lingkungan yang belum terintegrasi secara ramah ekologis. Sebagai contoh, sistem pengelolaan sampah di area kampus masih belum ada pemisah antara sampah organik dan anorganik di area publik. Selain masalah sampah, ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan paru-paru kampus masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pembangunan gedung-gedung baru ([Defriatno & Herdianto, 2024](#)). Kurangnya fasilitas pendukung yang hemat energi—seperti minimnya pemanfaatan pencahayaan alami, serta belum adanya jalur pejalan kaki (pedestrian) yang teduh dan nyaman—membuat ketergantungan civitas akademika terhadap kendaraan bermotor di dalam area kampus tetap tinggi. Akibatnya, visi kampus hijau hanya berakhir sebagai slogan administratif, karena ruang fisik tempat civitas akademika beraktivitas sehari-hari belum didesain untuk mendukung kelestarian ekosistem.

### **3. Perilaku Konsumtif Energi Listrik**

Perilaku konsumtif energi listrik di lingkungan kampus tercermin dari tingginya pemborosan penggunaan daya harian akibat kurangnya kesadaran ekologis dan ketidadaan budaya hemat energi (energy-saving culture) di kalangan warga kampus. Masalah ini terlihat nyata dari kebiasaan membiarkan lampu, pendingin ruangan (AC), komputer, serta proyektor tetap menyala di ruang-ruang kelas, laboratorium, dan perkantoran birokrasi meskipun ruangan tersebut sedang kosong atau kegiatan perkuliahan telah usai. Minimnya sistem kendali otomatis dan belum adanya regulasi internal yang tegas mengenai pembatasan penggunaan listrik di luar jam kerja memperparah kondisi ini, sehingga institusi tidak hanya mengalami

pembengkakan biaya operasional finansial, tetapi juga berkontribusi negatif terhadap peningkatan jejak karbon dan emisi gas rumah kaca yang memperburuk krisis iklim global.



**Gambar 1.** Diagram Fishbone

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

| No | Identifikasi Masalah                                   | U | S | G | Total Nilai |
|----|--------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|
| 1  | Rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu | 5 | 5 | 5 | 15          |
| 2  | Keterbatasan fasilitas pengelolaan lingkungan          | 4 | 4 | 4 | 12          |
| 3  | Perilaku konsumtif energi listrik                      | 3 | 4 | 4 | 11          |

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor 1 (Rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

### Rumusan Masalah

Rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu akibat keterbatasan infrastruktur pengolahan mandiri yang berkelanjutan sebagai dampak langsung dari kebijakan internal universitas yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan sarana akademik formal ketimbang fasilitas kelola lingkungan.

## **Tujuan dan Manfaat Kajian**

### **Tujuan Kajian:**

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran berupa model integrasi antara nilai-nilai ekoteologi Islam dengan praksis manajemen kebijakan publik di lingkungan perguruan tinggi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pengolahan limbah terpadu di lingkungan kampus.
3. Untuk mengevaluasi dampak kebijakan internal universitas yang cenderung memprioritaskan sarana akademik formal ketimbang fasilitas pengelolaan lingkungan.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan (rektor) serta pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan atau revisi kebijakan.
5. Untuk menambah wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik.

### **Manfaat Kajian:**

1. Memberikan kontribusi pemikiran berupa model integrasi antara nilai-nilai ekoteologi Islam dengan praksis manajemen kebijakan publik di lingkungan perguruan tinggi.
2. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dinamika kebijakan kampus hijau (green campus) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
3. Sebagai bahan pertimbangan, evaluasi, dan naskah rekomendasi kebijakan dalam menyusun dokumen rencana induk (blue print) kampus hijau serta draf rencana strategis (Renstra) universitas yang ramah ekologi.
4. Memberikan panduan taktis dalam melakukan reorientasi alokasi anggaran belanja yang lebih proporsional antara pembangunan fisik gedung dan fasilitas kelola lingkungan.
5. Mendorong terciptanya ekosistem spasial yang kondusif (insentif struktural) guna menstimulasi transformasi perilaku acuh tak acuh menuju budaya kesalehan ekologis (ecological piety) yang aktif.

## **KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### **Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori *Green Campus***

Sebuah kerangka konseptual yang menuntut institusi pendidikan tinggi untuk secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan efisiensi ekologis ke dalam seluruh aspek pengelolaan universitas, yang meliputi tata kelola infrastruktur, proses akademik, serta budaya perilaku warganya (Jusuf et al., 2020). Teori ini menegaskan bahwa kampus tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat mentransmisikan teori-teori lingkungan di dalam ruang kelas, melainkan harus

bertransformasi menjadi sebuah laboratorium hidup (living laboratory) yang secara nyata mempraktikkan mitigasi dampak lingkungan (Handayani, 2025). Dalam penerapannya, konsep Green Campus diukur melalui indikator-indikator krusial seperti efisiensi pemanfaatan energi dan air, penerapan sistem administrasi nirkertas (paperless), pengurangan emisi karbon kendaraan, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, hingga tata laksana pengolahan limbah domestik yang ramah lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan (Buana et al., 2018).

2. Teori Ekoteologi Islam

Kerangka pemikiran keagamaan kontemporer yang merekonstruksi dan menafsirkan kembali teks-teks suci al-Qur'an serta Hadis guna merespons krisis lingkungan hidup global melalui pendekatan teologis-normatif (Baidhawi, 2025). Teori ini mendekonstruksi cara pandang antroposentrisme sekuler yang eksploitatif dengan menawarkan paradigma teosentris yang menegaskan bahwa alam semesta adalah āyāt (tanda-tanda eksistensi) Allah yang suci, interdependen, dan wajib dijaga kelestariannya (Sara, 2025). Dalam operasionalisasinya, ekoteologi Islam berdiri di atas pilar-pilar teologis utama seperti tawhīd (kesatuan penciptaan yang merefleksikan keesaan Tuhan), mīzān (keharusan menjaga keseimbangan ekosistem), dan khilāfah (amanah manusia sebagai pengurus, bukan pemilik absolut bumi), sehingga setiap tindakan merusak lingkungan dikategorikan sebagai bentuk fasād (kerusakan moral dan material) yang dilarang agama, sementara aksi konservasi alam dinilai sebagai manifestasi ibadah yang berdimensi eskatologis (Uttunggadewa, 2026).

3. Teori Tripartit Keberlanjutan Perguruan Tinggi (*The Higher Education Sustainability Tripartite*)

Teori ini menjelaskan bahwa gerakan kampus hijau tidak akan berdampak sistemik jika hanya berfokus pada salah satu dimensi saja; misalnya, pengajaran ekologi di kelas akan lumpuh jika tidak didukung oleh sistem operasional kampus yang ramah lingkungan dan budaya keseharian warga kampus yang peduli ekosistem (Handayani, 2025). Dalam penerapannya di lingkungan pendidikan tinggi, model tripartit ini berfungsi sebagai panduan holistik bagi pembuat kebijakan kampus untuk menyelaraskan kurikulum berbasis keberlanjutan, manajemen logistik perkantoran yang hemat energi dan minim limbah, serta penguatan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika guna menciptakan dampak pelestarian lingkungan yang nyata dan berkelanjutan (Rachmadian et al., 2025).

4. Teori Akuntabilitas Publik dan Tata Kelola Kelembagaan (*Institutional Governance Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa kegagalan penanganan suatu urusan publik—seperti lemahnya pengelolaan lingkungan di lingkungan universitas—bukan semata-mata karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat runtuhnya sistem tata kelola kelembagaan yang ditandai oleh kekosongan unit kerja khusus, tidak adanya indikator kinerja utama (key performance indicators) yang jelas, serta mandeknya fungsi pengawasan (Widya Pramana et al., 2026). Dalam konteks kebijakan tata kelola pendidikan tinggi, teori ini menuntut adanya pembagian peran yang tegas, pengalokasian anggaran yang responsif terhadap kebutuhan organisasi, serta adanya skema reward and punishment yang konsisten guna menjamin bahwa setiap kebijakan yang telah dicanangkan dapat ditransformasikan menjadi tindakan operasional yang akuntabel oleh seluruh elemen birokrasi (Wigiyantini et al., 2025).

5. Teori Pengelolaan Limbah Berkelanjutan

Berbeda dengan model pengelolaan konvensional yang bersifat linear (kumpul-angkut-buang), teori ini berorientasi pada prinsip ekonomi sirkular yang dioperasikan melalui hierarki pengelolaan limbah, mulai dari pencegahan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pemulihan energi (*recovery*), hingga pembuangan akhir yang aman (*disposal*) (Hidayat et al., 2024). Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, teori ini menuntut universitas untuk menerapkan sistem pengelolaan terpadu yang didukung oleh infrastruktur pemilahan modern, tata ruang yang memadai, serta regulasi internal yang ketat guna memastikan seluruh rantai buangan domestik dapat diolah secara mandiri dan berkelanjutan (Retnoningsih et al., 2022).

### **Kerangka Konseptual**

1. Konsep *Sustainable University Governance* (Tata Kelola Universitas Berkelanjutan)

Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah institusi pendidikan tinggi tidak lagi hanya diukur melalui luaran akademik formal, melainkan melalui integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam orientasi pembuatan keputusan strategis dan kebijakan operasional internal kampus (Akhir & Siagian, 2025). Tanpa adanya tata kelola yang berkelanjutan (*sustainable governance*), semua konsep luhur teologi maupun sains lingkungan di universitas akan terjebak sebagai "Menara Gading"—indah di dalam ruang kelas dan jurnal ilmiah, namun lumpuh dalam mempraktikkannya di halaman kampus sendiri

2. Konsep *Islamic Environmentalism* (Environmentalisme Islam)

Konsep ini menjelaskan paradigma kesadaran lingkungan yang melandaskan seluruh aksi konservasi dan kelestarian alam pada doktrin spiritual, teologis, serta etika normatif Islam (Yusran et al., 2026). Konsep ini memandang krisis ekologi global saat ini bukan sekadar kegagalan teknis semata, melainkan manifestasi dari krisis spiritual manusia modern yang terjebak dalam cara pandang antroposentrisme yang eksploitatif dan destruktif (Haward, 2022). Berbeda dengan gerakan lingkungan sekuler yang dominan bersandar pada kalkulasi materialistis, *Islamic Environmentalism* secara harmonis mengintegrasikan dimensi transendental hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan sosial (*hablum minannas*) dengan mandat suci menjaga keseimbangan kosmos (*hablum minal alam*) (Catur & Zahid, 2024). Dalam kerangka pikir ini, manusia tidak diposisikan sebagai pemilik mutlak alam semesta, melainkan mengemban amanah sebagai *khalifah fi al-ard* (wakil Tuhan di bumi) yang wajib mengimplementasikan prinsip *tawhīd* (kesatuan penciptaan), *mīzān* (keseimbangan), dan *amānah* (tanggung jawab moral), sehingga setiap tindakan nyata dalam merawat dan melindungi bumi dinilai secara teologis sebagai bagian integral dari ibadah serta perwujudan keimanan yang substantif (Arsyad & Hasanah, 2025).

3. Konsep *Eco-Justice in Education* (Keadilan Ekologis dalam Pendidikan)

Konsep ini menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh netral terhadap krisis lingkungan, melainkan harus aktif membongkar akar budaya modern—seperti konsumerisme, individualisme ekstrem, dan antroposentrisme—yang melegitimasi eksploitasi terhadap alam sekaligus memarginalkan kelompok sosial tertentu (Sugar, 2025). Dalam penerapannya di institusi pendidikan tinggi, konsep ini menuntut adanya reformasi kurikulum dan kebijakan tata kelola yang tidak hanya mengajarkan kesadaran lingkungan di dalam kelas, melainkan juga mempraktikkan

keadilan ekologis secara nyata melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang sehat, pemenuhan hak atas lingkungan kampus yang bebas dari polusi limbah, serta pelibatan aktif seluruh komunitas akademik dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lokal (Kurniawati & Sutriani, 2026).

4. Konsep *Institutional Isomorphism* (Isomorfisme Institusional)

Konsep yang menjelaskan mengapa organisasi-organisasi dalam suatu bidang (industri) yang sama cenderung menjadi sangat mirip satu sama lain dari waktu ke waktu, baik dalam hal struktur, budaya, maupun praktik kerja. Teori yang dipopulerkan oleh Paul DiMaggio dan Walter Powell ini menyatakan bahwa keseragaman ini tidak selalu didorong oleh motif efisiensi internal, melainkan oleh tekanan lingkungan untuk mendapatkan legitimasi sosial agar organisasi tersebut diakui dan dapat bertahan hidup (Lase et al., 2025). Proses penyeragaman ini terjadi melalui tiga jalur utama: koersif (tekanan atau paksaan dari aturan eksternal seperti regulasi pemerintah), mimetik (kecenderungan meniru organisasi lain yang dianggap sukses saat menghadapi ketidakpastian), dan normatif (pengaruh dari profesionalisasi, latar belakang pendidikan, serta jaringan standar profesi yang sama). Konsep ini menjelaskan bagaimana organisasi mengadopsi struktur baru untuk mendapatkan legitimasi sosial. Perguruan tinggi keagamaan yang mengadopsi konsep green campus melalui penyediaan infrastruktur pemrosesan limbah melakukan penyesuaian bentuk (normative isomorphism) agar selaras dengan standar global universitas modern yang bertanggung jawab secara ekologis.

5. Konsep Akuntabilitas Publik dan *Good Eco-Governance*

Kedua konsep yang saling memperkuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Akuntabilitas Publik menekankan pada kewajiban para pemegang mandat (pemerintah/organisasi) untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik secara transparan kepada masyarakat (Fitrianti, 2025). Ketika konsep ini diintegrasikan dengan Good Eco-Governance (Tata Kelola Lingkungan yang Baik), fokus pertanggungjawaban tersebut diperluas tidak hanya pada aspek finansial dan administrasi, tetapi juga pada pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. Sinergi kedua konsep ini memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan yang diambil wajib mengedepankan prinsip keberlanjutan, melibatkan partisipasi aktif warga, dan dapat dipertanggungjawabkan dampak ekologisnya demi kesejahteraan generasi sekarang maupun masa depan.

Konsep ini menggabungkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan kepedulian lingkungan. Perguruan tinggi negeri, termasuk PTKIN, dituntut tidak hanya akuntabel secara finansial dan administratif di mata kementerian, tetapi juga harus memiliki akuntabilitas ekologis (*ecological accountability*). Regulasi internal adalah wujud nyata dari transparansi manajemen kampus dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas akademiknya ([Nazwa Maylanda Puteri dkk. 2025](#)).

## METODOLOGI

Kajian kebijakan ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-evaluatif untuk menelaah hambatan struktural dalam implementasi program ekoteologi di UIN Syekh Wasil Kediri. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai adaptif dan efektif dalam mengeksplorasi secara mendalam fenomena kesenjangan antara regulasi nasional (kebijakan top-down) dengan realitas tata kelola lingkungan di tingkat lokal ([Presta dkk. 2025](#)). Kajian ini difokuskan pada evaluasi konten kebijakan (analysis

of policy) serta pengkajian proses penganggaran internal universitas yang memicu defisit infrastruktur pengolahan limbah mandiri. Melalui metode deskriptif-evaluatif, data empiris mengenai ketersediaan fasilitas ekologis dan pola perilaku warga kampus disintesis untuk memetakan akar penyebab stagnasi program lingkungan secara objektif.

Data dalam kajian ini dihimpun melalui teknik studi pustaka (library research) yang mendalam dan sistematis terhadap sumber-sumber literatur sekunder (unobtrusive research). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen regulasi kementerian terkait guna membangun landasan teoretis yang kokoh mengenai implementasi program lingkungan (Faisal [Husain](#) dan Korbaffo 2024). Selain itu, metode ini digunakan untuk membedah data teks dari dokumen resmi kelembagaan yang telah dipublikasikan, yang mencakup Dokumen Rencana Strategis (Renstra) universitas, serta laporan hasil Evaluasi Implementasi Asta Protas. Melalui penelaahan pustaka yang komprehensif terhadap data-data tekstual tersebut, kajian ini dapat memetakan pola perilaku konsumtif energi dan tingkat keterlibatan warga kampus dalam pemilahan sampah secara makro tanpa perlu melakukan intervensi langsung di lapangan.

Analisis prioritas masalah dalam kajian kebijakan ini diselenggarakan secara terstruktur menggunakan matriks metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Metode USG merupakan instrumen analisis kebijakan yang digunakan untuk menentukan tingkat urgensi waktu, keseriusan dampak, serta laju pertumbuhan risiko dari isu-isu ekologis yang teridentifikasi dari hasil observasi dan telaah dokumen ([Utari dan Wahyuni 2020](#)). Penilaian pada setiap indikator ditakar menggunakan skala Likert berbobot 1 hingga 5 berdasarkan tabulasi data empiris dan evaluasi dokumen yang tersedia. Masalah dengan total skor tertinggi kemudian ditetapkan sebagai isu prioritas utama, yang selanjutnya dibedah lebih lanjut menggunakan diagram tulang ikan (fishbone diagram) untuk mengisolasi akar penyebab masalah (root cause analysis) pada level kebijakan kelembagaan.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan melalui teknik analisis opsi kebijakan (policy options analysis). Seluruh data yang telah direduksi dan divalidasi menggunakan triangulasi data—antara hasil observasi lapangan, kuesioner, dan dokumen internal—kemudian dikonstruksikan ke dalam sebuah draf naskah rekomendasi yang rasional, akuntabel, dan aplikatif ([Sekar Wangi dan Azhar 2025](#)). Rekomendasi diformulasikan dengan mempertimbangkan aspek kelayakan politik, efisiensi ekonomi, dan efektivitas administratif agar dapat diadopsi sebagai dokumen rencana induk (blue print) pengembangan kampus hijau. Melalui tahapan sistematis ini, kajian diharapkan mampu menghasilkan instrumen kebijakan (policy instruments) baru yang dapat memaksa terjadinya reorientasi anggaran demi pemenuhan fasilitas kelola lingkungan yang berkelanjutan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi kebijakan ekoteologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri masih menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pelembagaannya. Hal ini tercermin dari hasil Evaluasi Implementasi Asta Protas pada program Ekoteologi yang menunjukkan capaian pada kategori sangat kurang. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai-nilai ekoteologi ke dalam sistem tata kelola dan aktivitas operasional kampus belum berlangsung secara optimal. Dengan kata lain, masih

terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan ekoteologi yang dirumuskan pada tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat satuan kerja.

Dalam praktiknya, berbagai inisiatif lingkungan yang telah dilaksanakan di lingkungan kampus menunjukkan adanya komitmen awal terhadap agenda ekoteologi. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih memerlukan penguatan melalui integrasi yang lebih sistematis ke dalam kebijakan, perencanaan strategis, dan tata kelola universitas. Dengan demikian, implementasi ekoteologi tidak hanya hadir dalam bentuk kegiatan-kegiatan simbolik yang bersifat insidental, tetapi dapat berkembang menjadi bagian integral dari budaya organisasi dan sistem pengelolaan kampus secara keseluruhan.

Terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa memberikan dorongan kuat bagi seluruh satuan kerja Kementerian Agama untuk berpartisipasi dalam aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa merupakan salah satu bentuk implementasi program ekoteologi yang menjadi bagian dari Asta Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029.

Kondisi tersebut kemudian memengaruhi cara pandang sebagian warga dan satuan kerja dalam memaknai ekoteologi. Karena program yang paling banyak disosialisasikan dan diimplementasikan adalah gerakan penanaman pohon, ekoteologi sering kali dipersepsikan secara sempit sebagai kegiatan penghijauan atau penanaman pohon semata. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja, madrasah, perguruan tinggi keagamaan, kantor Kementerian Agama, maupun lembaga keagamaan lebih banyak berfokus pada aksi penanaman pohon sebagai wujud nyata pelaksanaan program ekoteologi.

Padaahal, secara konseptual ekoteologi memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar penanaman pohon. Ekoteologi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kesadaran dan tanggung jawab ekologis dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, implementasinya dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, konservasi energi dan air, digitalisasi administrasi untuk mengurangi konsumsi kertas, pengembangan ruang hijau, serta edukasi dan pembudayaan perilaku ramah lingkungan di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Seperti yang terjadi di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri, implementasi ekoteologi masih belum terarah. Beberapa fakultas yang masih memiliki lahan yang cukup luas memiliki inisiatif melakukan penanaman pohon, berbeda dengan fakultas lain yang memiliki lahan terbatas.

Keterbatasan infrastruktur pendukung pengelolaan lingkungan di UIN Syekh Wasil Kediri masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program ekoteologi. Meskipun berbagai inisiatif pelestarian lingkungan telah berkembang di kalangan dosen dan mahasiswa, pelaksanaannya belum sepenuhnya didukung oleh sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan yang memadai ([Sulaiman 2024](#)). Kondisi ini menyebabkan sejumlah gagasan dan program yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan belum dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur serta dukungan kebijakan institusional menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas berbagai program lingkungan yang telah diinisiasi oleh civitas akademika.

Pada aspek pengelolaan sampah, universitas telah menyediakan fasilitas berupa tempat sampah di berbagai lokasi strategis, seperti area gedung, kantin, dan ruang terbuka hijau kampus. Penyediaan sarana tersebut menunjukkan adanya komitmen institusi dalam

mendukung terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas pengelolaan sampah masih memerlukan penguatan melalui sistem yang lebih terintegrasi. Meskipun praktik pemilahan sampah telah mulai diperkenalkan dan sebagian civitas akademika telah berupaya menerapkannya, proses pengelolaan pada tahapan berikutnya belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Dalam beberapa kondisi, sampah yang telah dipilah pada tingkat sumber masih mengalami pencampuran kembali pada tahap pengumpulan dan pengangkutan menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), sehingga manfaat pemilahan sampah belum dapat diperoleh secara optimal.

Belum terintegrasinya sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir berpotensi memengaruhi persepsi dan tingkat partisipasi civitas akademika dalam mendukung program ekoteologi. Dalam perspektif perilaku organisasi, keberhasilan perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem dan fasilitas yang mampu mendukung praktik yang diharapkan. Ketika upaya pemilahan sampah yang dilakukan oleh warga kampus belum diikuti dengan mekanisme pengelolaan lanjutan yang konsisten, motivasi untuk mempertahankan perilaku tersebut dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pengelolaan sampah yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Sistem yang terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah, tetapi juga dapat memperkuat partisipasi civitas akademika dalam mendukung implementasi ekoteologi dan mewujudkan kampus yang berkelanjutan.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori perilaku organisasi yang menjelaskan bahwa keberhasilan perubahan perilaku individu sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem dan fasilitas yang tersedia dalam organisasi. Kehadiran infrastruktur yang memadai serta mekanisme operasional yang konsisten dapat memperkuat partisipasi dan komitmen anggota organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan bersama ([Rahendaputri dkk. 2024](#)). Ketidaktersediaan sistem pengolahan mandiri akhirnya memaksa UIN Syekh Wasil Kediri terus menerapkan model pengelolaan sampah konvensional.

Model pengelolaan sampah konvensional yang diterapkan kampus saat ini masih bergantung penuh pada pendekatan linear tradisional dengan prinsip "kumpul, angkut, dan buang". Pendekatan end-of-pipe ini mengabaikan konsep sirkular dan hierarki pengelolaan limbah modern yang menekankan reduksi serta daur ulang sejak dari hulu ([Defriatno dan Herdianto 2024](#)). Seluruh beban residu limbah domestik kampus langsung dipindahkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) daerah tanpa ada proses reduksi volume secara mandiri di dalam kampus. Ketergantungan yang tinggi pada pihak luar ini tidak hanya memicu pembengkakan biaya operasional tahunan, tetapi juga memperbesar jejak karbon institusi akibat emisi gas rumah kaca dari proses transportasi logistik sampah.

Berdasarkan hasil analisis diagram tulang ikan (fishbone diagram), akar permasalahan dalam pengelolaan limbah di lingkungan kampus dapat ditelusuri pada belum tersusunnya dokumen rencana induk (blueprint) berupa Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi sebagai acuan pengembangan kampus hijau yang komprehensif dan terintegrasi. Hingga saat ini, isu ekoteologi dan keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya terakomodasi sebagai indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) institusi. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pelestarian lingkungan di lingkungan kampus masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dalam suatu kerangka kebijakan yang sistematis. Selain itu, belum tersedianya regulasi operasional dan pedoman teknis yang memadai berimplikasi pada terbatasnya efektivitas implementasi program-program lingkungan, sehingga berbagai inisiatif yang telah dicanangkan pada tingkat nasional

belum dapat diinternalisasikan secara optimal ke dalam tata kelola dan budaya organisasi kampus.

Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu. Pengelolaan limbah pada dasarnya merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan kampus berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan perilaku sehari-hari warga kampus. Keberhasilan sistem pengelolaan limbah sangat bergantung pada keterlibatan aktif mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur pimpinan dalam melakukan pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan limbah secara bertanggung jawab. Namun, tingkat keterlibatan tersebut masih relatif rendah sehingga berbagai upaya pengelolaan limbah belum berjalan secara optimal.

Rendahnya partisipasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan fasilitas pengelolaan lingkungan yang tersedia di lingkungan kampus. Infrastruktur pendukung seperti tempat sampah terpilah, bank sampah, fasilitas pengolahan kompos, sarana daur ulang, maupun media edukasi lingkungan masih belum tersedia secara memadai. Keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan warga kampus mengalami kesulitan untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan secara konsisten. Pada saat yang sama, minimnya sarana pendukung juga menurunkan efektivitas berbagai program edukasi dan kampanye lingkungan yang telah dilakukan.

Selain persoalan pengelolaan limbah, perilaku konsumtif energi listrik juga menjadi tantangan dalam implementasi program ekoteologi. Penggunaan perangkat elektronik yang tidak efisien, kebiasaan membiarkan lampu dan pendingin ruangan tetap menyala ketika tidak digunakan, serta rendahnya budaya hemat energi menunjukkan bahwa kesadaran ekologis di lingkungan kampus masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya biaya operasional institusi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan jejak karbon kampus yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Ketiga permasalahan tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran persoalan yang menghambat implementasi program ekoteologi. Keterbatasan fasilitas pengelolaan lingkungan menyebabkan rendahnya keterlibatan sivitas akademika dalam program lingkungan. Rendahnya partisipasi kemudian memperlemah efektivitas berbagai kebijakan dan program yang telah dirancang. Sementara itu, perilaku konsumtif energi listrik mencerminkan belum terbentuknya budaya ekologis yang menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi ekoteologi di lingkungan kampus.

Berdasarkan hasil analisis USG, masalah kebijakan nomor 1 (Rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu). Masalah ini menduduki prioritas tertinggi karena merupakan akar dari segala program lingkungan di kampus. Meskipun fasilitas disediakan, jika kesadaran dan partisipasi civitas akademika berada pada titik nadir, sistem pengelolaan limbah akan total lumpuh (Urgency). Dampaknya sangat serius terhadap kegagalan implementasi nilai ekoteologi (Seriousness), dan jika dibiarkan, budaya acuh tak acuh ini akan tumbuh menjadi karakter yang sulit diubah pada generasi mahasiswa berikutnya (Growth).

Rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu di lingkungan kampus tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan, sarana pendukung, dan perilaku warga kampus yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pengelolaan limbah serta internalisasi nilai-nilai ekoteologi dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Salah satu penyebab utama adalah ketiadaan unit kerja atau tim khusus yang memiliki otoritas dalam sistem pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Keberadaan unit khusus sangat penting dalam memastikan adanya perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Tanpa adanya struktur kelembagaan yang jelas, berbagai program pengelolaan sampah cenderung bersifat sporadis, bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu, dan tidak memiliki keberlanjutan yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya aktor yang secara khusus bertanggung jawab dalam menggerakkan partisipasi sivitas akademika maupun memastikan keterlaksanaan program pengelolaan limbah secara konsisten. Fadhil et al. (2021) menegaskan bahwa kelembagaan lingkungan yang kuat merupakan prasyarat utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Selain aspek kelembagaan, keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah mandiri yang berkelanjutan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi warga kampus. Infrastruktur merupakan instrumen penting yang memungkinkan sivitas akademika menerapkan perilaku pengelolaan limbah secara praktis dan berkelanjutan. Ketersediaan fasilitas seperti tempat sampah terpilah, bank sampah, fasilitas komposting, pusat daur ulang, dan sarana edukasi lingkungan dapat mendorong terbentuknya kebiasaan pengelolaan limbah yang lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas tersebut mengakibatkan warga kampus tidak memiliki akses yang memadai untuk melakukan pemilahan dan pengolahan limbah sesuai prinsip keberlanjutan. Akibatnya, partisipasi dalam program pengelolaan limbah menjadi rendah karena tidak didukung oleh sarana yang memadai. Sutrisno dan Handayani (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan limbah berbasis institusi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang mampu mendukung perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya partisipasi adalah perilaku konsumtif warga kampus yang memicu tingginya produksi limbah plastik sekali pakai setiap hari. Pola konsumsi yang masih didominasi oleh penggunaan kemasan sekali pakai, botol plastik, kantong plastik, dan berbagai produk yang sulit terurai menunjukkan bahwa kesadaran ekologis sivitas akademika belum berkembang secara optimal. Tingginya konsumsi produk sekali pakai tidak hanya meningkatkan volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga memperbesar beban sistem pengelolaan limbah kampus. Dalam kondisi tersebut, upaya pengurangan sampah dari sumbernya menjadi sulit diwujudkan karena perilaku konsumsi warga kampus masih belum selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Ramadhan dan Utami (2023) menyatakan bahwa perilaku konsumtif merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan meningkatnya produksi limbah plastik di lingkungan pendidikan dan menjadi tantangan utama dalam penerapan program pengelolaan sampah terpadu.

Hasil analisis pohon masalah menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu tidak hanya disebabkan oleh faktor perilaku individu, tetapi merupakan manifestasi dari permasalahan yang lebih mendasar dalam tata kelola lingkungan kampus. Permasalahan tersebut terbentuk melalui hubungan kausal yang saling berkaitan mulai dari tingkat kebijakan, penyediaan sumber daya, hingga tingkat implementasi program di lapangan.

Pada level paling mendasar, akar permasalahan terletak pada kebijakan internal universitas yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan sarana akademik formal dibandingkan dengan penyediaan fasilitas pengelolaan lingkungan. Orientasi kebijakan tersebut menyebabkan alokasi sumber daya institusi, baik dalam bentuk anggaran, perencanaan pembangunan, maupun prioritas program, lebih banyak diarahkan pada

pengembangan fasilitas yang secara langsung mendukung kegiatan akademik. Meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, konsekuensinya adalah aspek pengelolaan lingkungan belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam perencanaan dan pengembangan institusi.

Dominasi orientasi pembangunan akademik tersebut berdampak pada terbatasnya investasi kampus dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan terbentuknya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap pelestarian lingkungan dengan kapasitas institusional yang tersedia untuk mewujudkan komitmen tersebut dalam praktik nyata. Akibatnya, berbagai program lingkungan yang dirancang belum memiliki dukungan infrastruktur yang memadai untuk dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah munculnya keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah mandiri yang berkelanjutan di lingkungan kampus. Infrastruktur pengelolaan limbah merupakan komponen penting dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan karena berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan sivitas akademika menerapkan perilaku pengelolaan limbah secara benar. Ketersediaan fasilitas seperti tempat sampah terpilah, bank sampah, unit pengolahan kompos, fasilitas daur ulang, serta sistem pengelolaan limbah terpadu menjadi faktor pendukung utama dalam membangun budaya lingkungan yang berkelanjutan.

Namun demikian, keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan proses pengelolaan limbah belum dapat berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Warga kampus mengalami keterbatasan akses terhadap sarana yang dapat mendukung praktik pengurangan, pemilahan, dan pengolahan limbah dari sumbernya. Dalam kondisi demikian, upaya membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan menjadi kurang efektif karena tidak didukung oleh instrumen dan fasilitas yang memadai.

Lebih lanjut, keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah berdampak pada rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu, yang merupakan masalah utama dalam implementasi program ekoteologi di UIN Syekh Wasil Kediri. Partisipasi merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas karena menentukan tingkat keterlibatan individu dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ketika fasilitas pendukung tidak tersedia secara memadai, motivasi dan kesempatan warga kampus untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan limbah menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai program lingkungan yang telah dirancang tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Rendahnya keterlibatan sivitas akademika dalam pengelolaan limbah pada akhirnya menghambat proses internalisasi nilai-nilai ekoteologi yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap pelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah keagamaan. Dengan demikian, rendahnya partisipasi dalam pengelolaan limbah terpadu dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari lemahnya dukungan kelembagaan dan infrastruktur lingkungan yang tersedia di lingkungan kampus.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, penguatan implementasi ekoteologi di UIN Syekh Wasil Kediri memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi pada aspek regulasi, pembiayaan, tata kelola, dan pengembangan akademik. Langkah strategis pertama adalah penyusunan Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi yang terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan program keberlanjutan di tingkat satuan kerja. Dokumen tersebut perlu memuat arah kebijakan implementasi ekoteologi dengan indikator kinerja yang terukur, mencakup pengelolaan limbah, konservasi energi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta mekanisme audit lingkungan secara

berkala yang ditetapkan melalui regulasi internal universitas (Bardach & Patashnik, 2020). Integrasi nilai-nilai ekoteologi ke dalam dokumen perencanaan strategis akan memberikan arah kebijakan yang jelas sekaligus memperkuat komitmen seluruh unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

Langkah berikutnya adalah penerapan pendekatan green budgeting dalam pengelolaan keuangan institusi. Kebijakan ini diarahkan pada penguatan alokasi sumber daya untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan program lingkungan, seperti fasilitas pengelolaan limbah, konservasi energi, serta teknologi pendukung kampus berkelanjutan (Dunn, 2018). Melalui penganggaran yang berorientasi pada keberlanjutan, universitas dapat meningkatkan efektivitas implementasi program lingkungan sekaligus memastikan tersedianya dukungan sumber daya yang memadai bagi pencapaian target kampus hijau.

Selain itu, keberlanjutan program memerlukan penguatan aspek akademik dan sistem pengawasan kelembagaan. Integrasi ekoliterasi dan nilai-nilai ekoteologi Islam ke dalam kurikulum perlu dilakukan secara sistematis melalui reorientasi capaian pembelajaran, materi perkuliahan, serta kegiatan pembelajaran berbasis aksi konservasi. Di sisi lain, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi melalui unit atau mekanisme pengawasan lingkungan yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu menjadi penting untuk memastikan implementasi program berjalan secara konsisten dan berkelanjutan (Creswell & Creswell, 2018).

Melalui sinergi antara penguatan regulasi, penganggaran berbasis lingkungan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta internalisasi nilai-nilai keberlanjutan dalam proses akademik, UIN Syekh Wasil Kediri berpeluang mengembangkan model implementasi ekoteologi yang lebih substantif, terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus agen transformasi sosial dalam mendukung terciptanya budaya kampus yang berwawasan lingkungan.

## **Analisis Kebijakan**

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diubah sebagian melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU).

Undang-undang ini merupakan landasan tertinggi yang mewajibkan setiap instansi atau badan hukum untuk melakukan pengelolaan limbah, efisiensi sumber daya, dan menjaga kelestarian ekosistem. UU ini juga mendorong integrasi materi lingkungan hidup ke dalam jalur pendidikan formal.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Peraturan ini menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kelestarian lingkungan hidup

3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / Sustainable Development Goals - SDGs): Menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan target SDGs. Di ranah pendidikan tinggi, hal ini mencakup penjaminan mutu akses air bersih (SDG 6), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), serta penanganan perubahan iklim (SDG 13).
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2025–2029:

PMA ini merupakan payung hukum tertinggi di internal kementerian yang secara eksplisit mengodifikasi kata "ekoteologi" sebagai indikator tujuan strategis. Regulasi ini mewajibkan penumbuhan kesadaran spiritual dalam menjaga alam serta mengintegrasikan aspek ekologis ke dalam target kinerja seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama.

5. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029:

Konteks Kebijakan: KMA ini menetapkan ekoteologi sebagai salah satu pilar program prioritas nasional kementerian. Keputusan ini menginstruksikan integrasi nilai-nilai kelestarian alam ke dalam tiga ranah utama: pendidikan (termasuk kurikulum dan tata kelola PTKIN), dakwah keagamaan, serta tata kelola kelembagaan yang ramah lingkungan.

### **Limitasi Kajian**

Kajian kebijakan ini memiliki limitasi pada ruang lingkup lokus dan metodologi yang digunakan, di mana analisis serta evaluasi yang dilakukan secara eksklusif hanya berfokus pada dinamika internal UIN Syekh Wasil Kediri, sehingga temuan maupun rekomendasi yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan secara mutlak untuk seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia yang memiliki karakteristik birokrasi dan kultur geografis berbeda. Selain itu, penggunaan matriks USG dalam menentukan prioritas masalah ini bersifat statis dan berfokus pada kondisi empiris saat kajian dilakukan di UIN Syekh Wasil Kediri, sehingga belum mampu memproyeksikan fluktuasi dampak krisis lingkungan secara jangka panjang jika terjadi intervensi kebijakan eksternal yang tidak terduga.

### **Kebaruan/Kontribusi**

Kebaruan dan kontribusi utama dari kajian kebijakan ini terletak pada integrasi teoretis antara nilai-nilai normatif ekoteologi Islam dengan instrumen analisis kebijakan publik praktis berbasis metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) dalam membedah tata kelola lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji ekoteologi sebatas pada wilayah diskursus tekstual atau hafal ayat, kajian ini memberikan kontribusi aplikatif dengan mentransformasikan konsep teologis tersebut menjadi indikator tata kelola yang terukur untuk mengevaluasi bias anggaran birokrasi kampus. Melalui pendekatan deskriptif-evaluative yang menyoroti kesenjangan implementasi kebijakan top-down dari Kementerian Agama di tingkat lokal, naskah kebijakan ini menghasilkan draf rencana aksi operasional (policy options) yang dapat diadopsi langsung sebagai rencana induk (blue print) pengembangan kampus hijau substantif bagi perguruan tinggi transisional seperti UIN Syekh Wasil Kediri.

### **ALTERNATIF KEBIJAKAN**

- Alternatif Kebijakan 1: Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi
- Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum induk (master plan) di tingkat universitas yang menetapkan standardisasi baku seluruh aktivitas sosio-religius dan operasional kampus yang berwawasan lingkungan.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternatif Kebijakan 2: | <p>Keputusan Rektor tentang Penambahan Klausul Ekologis ke dalam Perjanjian Kinerja Unit</p> <p>Regulasi ini mengintervensi langsung akar masalah pragmatisme birokrasi pimpinan dengan cara menyisipkan capaian ekologis ke dalam skema penilaian kinerja formal universitas.</p>                           |
| Alternatif Kebijakan 3: | <p>Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan</p> <p>Kebijakan ini menyasar langsung pada aspek operasional ekonomi kampus. Regulasi ini mewajibkan seluruh proses belanja operasional universitas beralih ke produk-produk yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan.</p> |

#### *Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn*

Dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn tidak secara eksplisit menyebutkan satu "teori skoring analisis kebijakan" yang tunggal dan terstruktur sebagai sebuah teori formal dengan langkah-langkah yang rigid. Namun, Dunn menekankan pentingnya **kriteria evaluasi** dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik.

Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.
- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
- Kecukupan (*adequacy*): Sejauh mana kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi.
- Pemerataan (*equity*): Bagaimana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat.
- Responsivitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.
- Kelayakan politik (*political feasibility*): Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada.

Dalam praktiknya, seorang analis kebijakan dapat mengembangkan sistem skoring dengan memberikan bobot yang berbeda pada setiap kriteria evaluasi berdasarkan prioritas dan nilai-nilai yang relevan dengan isu kebijakan tertentu. Kemudian, setiap alternatif kebijakan akan dinilai (diskorkan) berdasarkan kinerjanya pada setiap kriteria tersebut. Hasil skoring ini kemudian dapat digunakan untuk membandingkan dan meranking alternatif kebijakan, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, alih-alih satu teori skoring yang baku, Dunn lebih menekankan pada penggunaan kriteria evaluasi yang relevan dan sistematis untuk menilai dan membandingkan pilihan kebijakan.

**Tabel 2.** Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

| No | Alternatif Kebijakan                                                                  | Efektifitas | Efisiensi | Kecukupan | Eku-itas | Respon-sivitas | Kete-patan | Total Skor |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------------|------------|------------|
| 1  | <b>Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi</b>  | 5           | 5         | 5         | 4        | 4              | 4          | 27         |
| 2  | Keputusan Rektor tentang Penambahan Klausul Ekologis ke dalam Perjanjian Kinerja Unit | 3           | 5         | 3         | 5        | 4              | 4          | 24         |
| 3  | Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkung             | 4           | 3         | 3         | 3        | 3              | 3          | 19         |

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor **1 (Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi)** mendapatkan total skor tertinggi.

Berdasarkan hasil skoring alternatif kebijakan pada tabel di atas, maka **Alternatif 1: Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi** memiliki opsi yang paling menjanjikan untuk dijadikan rekomendasi kebijakan. Dengan total nilai tertinggi (27), alternatif ini dinilai paling efektif sebagai payung hukum dan arah yang jelas, karena memberikan dampak kepastian hukum dan teknis yang sangat signifikan (efektif) bagi pelaksanaan ekoteologi di Kampus menjadikannya pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Kajian kebijakan ini menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi civitas akademika dalam pengelolaan limbah terpadu di UIN Syekh Wasil Kediri merupakan masalah prioritas utama yang harus segera ditangani berdasarkan hasil analisis metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) dengan skor tertinggi (15). Rendahnya partisipasi ini bukanlah sekadar masalah kelalaian individu warga kampus, melainkan refleksi dari kegagalan sistemik institusi dalam mentransformasikan visi ekoteologi Islam menjadi sebuah budaya keberlanjutan yang nyata. Kondisi ini diperparah oleh adanya hambatan struktural berupa bias kebijakan penganggaran internal universitas yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik gedung akademik formal, sehingga memicu terjadinya defisit infrastruktur pengolahan limbah mandiri yang fungsional di lingkungan kampus.

Hasil evaluasi lapangan menunjukkan terjadinya kesenjangan yang lebar antara regulasi nasional (kebijakan top-down) dari Kementerian Agama dengan praksis tata kelola lingkungan di tingkat lokal, tecermin dari skor Evaluasi Implementasi Asta Protas pada protas Ekoteologi yang masuk dalam kategori Sangat Kurang. Penyediaan tempat sampah yang ada saat ini didapati di beberapa tempat hanya bersifat formalitas visual demi pemenuhan estetika dan penilaian administratif belaka, tanpa didukung oleh sistem pengelolaan hulu-hilir yang terintegrasi. Absennya dokumen rencana induk (blue

print) kampus hijau, kurikulum akademik yang masih kering akan muatan ekoliterasi praktis, serta ketiadaan unit kerja / tim khusus pengawas lingkungan menjadi faktor kausal utama yang melestarikan perilaku acuh tak acuh civitas akademika terhadap krisis lingkungan lokal.

Sebagai langkah intervensi strategis, UIN Syekh Wasil Kediri mutlak memerlukan rekonstruksi kebijakan melalui pengesahan regulasi lokal yang mengikat, seperti penyusunan Rencana Induk Kampus Hijau yang diintegrasikan ke dalam indikator kinerja utama universitas. Selain itu, manajemen universitas harus menerapkan skema pembiayaan berbasis lingkungan (green budgeting) guna mereorientasi anggaran modal untuk pengadaan sarana kelola limbah mandiri yang terstandarisasi. Melalui kombinasi antara kepastian hukum lokal, reorientasi anggaran yang proporsional, keteladanan dari pimpinan kampus, serta pelembagaan unit pengawas lingkungan, UIN Syekh Wasil Kediri diharapkan mampu bangkit bertransformasi menjadi pelopor gerakan green campus substantif yang memadukan kesalehan spiritual dengan aksi nyata pelestarian alam.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada **Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri** untuk menerbitkan **Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Kampus Hijau Berbasis Ekoteologi**. Bentuk regulasi ini dipilih sebagai prioritas utama karena memiliki keunggulan mutlak dengan skor tertinggi pada kriteria efektivitas dan kecukupan (skor 5), menjadikannya instrumen hukum yang paling kuat, mengikat, dan komprehensif dibandingkan alternatif lainnya. Dengan ditetapkan Peraturannya, universitas akan memiliki payung hukum yang jelas dan bersifat memaksa, yang tidak hanya mampu mengatasi kelemahan regulasi internal terkait isu lingkungan, tetapi juga secara strategis memaksa para pembuat kebijakan di tingkat unit untuk menggeser orientasi mereka dari yang semula hanya terpaku pada pemenuhan instrumen akreditasi institusi menuju tata kelola kampus yang berwawasan spiritual-ekologis secara berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- Akhir, M., & Siagian, Z. (2025). Sustainability dan Manajemen Lingkungan di Lembaga Pendidikan Islam. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 267–277. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i1.781>
- Arsyad, M., & Hasanah, N. (2025). Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v4i1.1361>
- Baidhawi, I. (2025). Tafsir Ekologis dalam Al-Qur'an: Menelusuri Konsep Khalifah dan Istikhlaf sebagai Respons Terhadap Krisis Lingkungan Global. *Jalalain: Journal of Qur'an and Hadith*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.65802/jalalain.v1i1.78>
- Buana, R. P., Wimala, M., & Evelina, R. (2018). Pengembangan Indikator Peran Serta Pihak Manajemen Perguruan Tinggi dalam Penerapan Konsep Green Campus. (Hal. 82-93). *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, 4(2), 82. <https://doi.org/10.26760/rekaracana.v4i2.82>
- Catur, C. B. I., & Zahid, A. Z. (2024). Religious Organizations as the Primary Instrument of Environmental Conservation (Case Study of Environmental Ethics of GP Ansor in

- Munjungan District, Trenggalek Regency): Organisasi Agama Sebagai Instrumen Utama Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Etika Lingkungan GP Ansor di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 4(1), 102–111. <https://doi.org/10.57152/conсен.v4i1.1297>
- Defriatno, M., & Herdianto, A. (2024). Analisis Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember Tahun 2023. *BIOSAPPHIRE: Jurnal Biologi Dan Diversitas*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.31537/biosapphire.v3i1.1731>
- Fitrianti, L. (2025). Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Fondasi Kepercayaan Publik Dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(11), 843–847. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i11.1291>
- Handayani, I. W. (2025). Mengukir Kesadaran Lingkungan: Sinergi Kebijakan dan Transformasi Perilaku Menuju Kampus Hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1413–1448. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.255>
- Haward, A. S. (2022). Ekologi Integral: Alternatif dalam Krisis Lingkungan Hidup. *MELINTAS*, 37(2), 152–176. <https://doi.org/10.26593/mel.v37i2.6295>
- Hidayat, H., Hamzah, A. H. P., & Hasrianti, H. (2024). Implementasi Konsep Ekonomi Sirkular Untuk Mewujudkan Industri Karet Remah Berkelanjutan. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.21009/jgg.141.001>
- Jusuf, E., Herwany, A., Kurniawan, P. S., & Gunardi, A. (2020). Sustainability Concept Implementation in Higher Education Institutions of Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(1), 27. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.1.27>
- Kurniawan, S., Masyhuri, A., & Tahir, M. (2025). Model Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Kawasan Wisata Berkelanjutan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Engineering (IJE)*, 5(2), 142–158. <https://doi.org/10.69503/ije.v5i2.1623>
- Kurniawati, E., & Sutriani, I. (2026). Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Studi Kasus Pendekatan Kualitatif. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 8(1), 13–28. <https://doi.org/10.61227/arji.v8i1.657>
- Lase, D., Absah, Y., Lumbanraja, P., Giawa, Y., & Gulo, Y. (2025). Teori Budaya Organisasi: Konsep, Model, dan Implikasi untuk Manajemen Organisasi. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 21–45. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.128>
- Rachmadian, R. H., Sumarmi, S., & Masruroh, H. (2025). Implementasi Strategi Inovatif Perguruan Tinggi dalam Menanamkan Sustainability Awareness pada Sivitas Akademika melalui Program Green Campus. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(1), 10–22. <https://doi.org/10.14710/jil.23.1.10-22>
- Retnoningsih, A., Fathoni, K., Utomo, A. P. Y., & Prasetyo, B. (2022). PEMANFAATAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI PRODUK BERNILAI EKONOMI MENUJU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ZERO WASTE. *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang*, (1), 193–224. <https://doi.org/10.15294/ka.vii1.90>

- Sara, B. M. Y. (2025). Menggugat Hegemoni Antroposentrisme Melalui Dekonstruksi Hermeneutika Ekologis. *Dekonstruksi*, 11(03), 118–126. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i03.319>
- Sugar, F. R. (2025). Konsumerisme Dan Krisis Lingkungan: Tinjauan Kritis Pendidikan dan Spiritualitas Ekologis dalam Ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 21(2), 84–99. <https://doi.org/10.46494/psc.v21i2.567>
- Uttunggadewa, L. F. (2026). Tauhid dan Tatahan Kosmos: Kontribusi Seyyed Hossein Nasr dalam Ekoteologi Islam Kontemporer. *Dekonstruksi*, 12(02), 3–13. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v12i02.395>
- Widya Pramana, A. P., S.Sami'an, Sarwono Hardjomuljadi, & Loso Loso. (2026). Pelaksanaan Good Governance dalam Administrasi Proyek Publik. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 7(3), 2168–2186. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i3.7304>
- Wigiyantini, M., Asep Rahmat Kurnia, Nuryaningsih, Rohayanah, Winda Widiastuti, & Abdulloh. (2025). ANALISIS PERAN KEBIJAKAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN SESUAI STANDAR NASIONAL. *Journal Development*, 13(1), 174–186. <https://doi.org/10.53978/jd.v13i1.575>
- Yusran, Abd. Wahid Haddade, & Patimah. (2026). Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 393–410. <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1944>
- Anwar, R. N. (2025). Nilai ekoteologi dalam Qur'an dan Hadis serta implementasinya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis proyek. *Jurnal Kartika*, 1(2), 430–445.
- Chayati, S., Ibrahim, R., & Gunagraha, S. (2025). Implementasi ekoteologi pendidikan Islam (Studi kasus MI Mambaul Huda Widodaren Ngawi). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Qiyam*, 6(2), 1215–1230.
- Dina, T. A. F., Ilahana, A. D., Rohaimi, S. T., Ardiyanto, M. F., & Hami, W. (2026). Peran Pendidikan Agama Islam dalam menghadapi krisis ekologi dan menumbuhkan kesadaran iman terhadap alam. *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan*, 6(1), 15–25. <https://doi.org/10.62509/ji.v6i1.326>
- Ghozali, G. (2025). Ekotiologi dan relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam untuk membentuk kesadaran siswa terhadap lingkungan. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(4), 2746–2762. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i4.575>
- Habibi, M. (2025). Revitalisasi nilai ekoteologi dalam pendidikan agama Islam di era disruptif: Kajian integratif tasawuf dan STEM. *Jurnal Studi Edukasi Integratif*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.53696/30474329>
- Nabilla, N., Silahuddin, S., & Zulfatmi, Z. (2025). Implementasi kebijakan ekoteologi dalam melestarikan lingkungan di Pesantren Modern Al-Manar. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1852–1861.
- Rohman, M. F., & Syaibani, I. A. (2026). Implementasi konsep ekoteologi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam: Arah penerapan dan kebijakan dalam merespons problematika lingkungan. *MISBAH: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(02), 160–175. Alshodiq, Mukhtar. 2020. Himpunan Peraturan Sistem

- Perbukuan dan Hak Cipta di Indonesia: Dilengkapi Peraturan Tentang Pemberian ISBN dan Akreditasi Penerbitan Ilmiah. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- Anwar, K. (2025). Reposisi peran khalifah fi al-arḍ dalam gerakan ekoteologi Islam di perguruan tinggi. Kediri Press.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving (6th ed.). CQ Press.
- Chayati, N., Sitorus, M., & Utama, J. (2025). Respons PTKIN terhadap krisis lingkungan global: Tantangan dan peluang ekoteologi. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 9(1), 78–92.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Dina, L., Rahayu, S., & Fitriani, A. (2026). Dekonstruksi antroposentrisme menuju kesalehan ekologis di institusi pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi Ekologi*, 14(2), 145–160.
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Ghozali, M. (2025). Inkonsistensi role modeling pimpinan dalam gerakan green campus: Studi kasus teologi dan praksis. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 29(2), 210–225.
- Habibi, I. (2025). Analisis kebijakan penganggaran internal universitas: Kasus bias fasilitas akademik vs lingkungan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Pendidikan*, 11(3), 189–204.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nabilla, S., Wijaya, H., & Lestari, D. (2025). Evaluasi sistem eco-efficiency dan tata kelola administrasi perkantoran modern di perguruan tinggi keagamaan. *Jurnal Manajemen Lingkungan Kampus*, 7(1), 33–49.
- Rohman, F., & Syaibani, A. (2026). Transmisi kebijakan top-down kementerian agama dan dinamika implementasi ekoteologi lokal. *Jurnal Analisis Kebijakan Islam*, 18(1), 102–118.
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.